

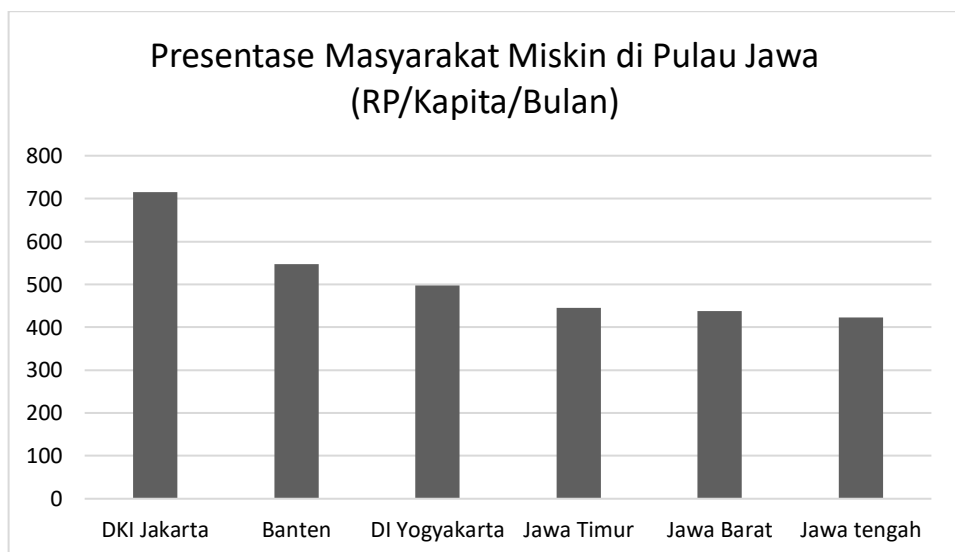
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan sering terjadi di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai banyak pulau yang menyebabkan peningkatan masyarakat miskin, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Salah satu pulau yang mempunyai banyak penduduk miskin yakni Pulau Jawa. BPS (2021), tercatat sekitar 14 juta masyarakat miskin di pulau Jawa atau 52 persen dari total masyarakat miskin di Indonesia.

GRAFIK 1.1
PRESENTASE MASYARAKAT MISKIN PER KAPITA
DI PULAU JAWA PADA TAHUN 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2021

BPS (2021) mencatat bahwa terdapat 26,5 juta masyarakat miskin. Sedangkan untuk di pulau Jawa sendiri terdapat 14 juta orang atau sekitar 52 persen dari seluruh total masyarakat Indonesia. DKI Jakarta mendapat urutan pertama penduduk miskin terbanyak yakni 715,052/kapita/bulan. Urutan ke dua yakni Banten dengan jumlah 547.483/kapita/bulan, DI Yogyakarta dengan jumlah 496,904/kapita/bulan, Jawa timur berjumlah 445.139/kapita/bulan, Jawa Barat mendapat urutan ke lima dengan jumlah 437.604/kapita/bulan. Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin terkecil di pulau Jawa dengan jumlah 423.264/kapita/bulan.

Tjahya (1997) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang mana semua akses serba terbatas. Seseorang bisa dikatakan miskin jika ditandai dengan rendahnya pendidikan, produktivitas untuk kerja, kesehatan, gizi dan kesejahteraan hidupnya yang tidak berdaya. Alcock, dkk (2022) mendeskripsikan kemiskinan yakni sebuah keadaan yang mana seseorang, laki-laki atau perempuan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Todaro (2006) berpendapat bahwa kemiskinan selalu berkaitan dengan berbagai macam dimensi kebutuhan seorang. Ade, dkk (2007) menjabarkan kemiskinan sebagai sebuah keadaan seseorang yang sedang terjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sementara dari lingkungannya kurang memberi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan. Jadi secara umum kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam

mencukupi kehidupan sehari-hari baik dari segi pangan, papan maupun sandang.

Chambers (2006) membedakan kemiskinan menjadi empat bentuk, yakni: pertama kemiskinan absolut, seseorang termasuk kedalam kemiskinan absolut jika pendapatan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua kemiskinan relatif, kemiskinan ini dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum tersebar ke masyarakat. Ketiga kemiskinan kultural, kemiskinan ini dipengaruhi oleh sikap masyarakat itu sendiri seperti tidak mau memperbaiki kehidupannya yang pemalas, boros dan tidak kreatif. Keempat kemiskinan struktural, yang disebabkan karena keadaan sumber daya dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik tidak mendukung pembebasan kemiskinan.

Jumlah kemiskinan di pulau Jawa cenderung tinggi yang membuat pemerintah merencanakan adanya penanggulangan kemiskinan yang terfokus pada pembangunan. Pemerintah menggunakan dua strategi, yakni mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin serta dengan program perlindungan sosial dan subsidi. Pemberdayaan ini menjadikan angka TPAK meningkat, karena dengan meningkatnya TPAK berarti tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang/jasa juga akan meningkat. Meningkatnya tenaga kerja membuat pertumbuhan ekonomi meningkat serta angka kemiskinan menjadi turun. Menurut (Prayitno & Yustie, 2020) langkah awal pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah memberikan bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat

berpenghasilan rendah, dilanjutkan dengan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) untuk meningkatkan prospek lapangan kerja. Selain itu Kristiyanto dan Widodo (2017) menjelaskan bahwa efisiensi secara umum, kabupaten/kota dengan tingkat efisiensi yang tinggi akan memberikan hasil terbaik (seperti penurunan angka kemiskinan). Dengan kata lain, kabupaten/kota yang telah mencapai tingkat efektivitas belanja langsung dan tidak langsung tersebut juga dapat diklaim mampu menurunkan tingkat kemiskinan kota atau kabupatennya melalui program-program yang telah dibuat. Tingkat efisiensi yang lebih baik juga berarti menciptakan peluang bagi program pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Tujuan orang untuk bekerja yakni agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendasar. Islam (2004) berpendapat bahwa dengan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin yakni untuk mencapai produktivitas yang cenderung tinggi, jadi penghasilannya meningkat. Kesimpulannya yakni peningkatan angkatan kerja yang diserap di lapangan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah yang sesuai, dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan itu dapat mengurangi angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga akan mempercepat peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan dan juga akan menyebabkan kemiskinan (Hariani, 2019).

TABEL 1.1
JUMLAH TPAK DI PULAU JAWA
AGUSTUS 2021

Provinsi	TPAK (%)
DI Yogyakarta	73.52
Jawa Timur	70.00
Jawa Tengah	69.58
Jawa Barat	64.95
Banten	63.79
DKI Jakarta	62.63

Sumber: BPS tahun 2021

Menurut data pada tabel 1.1, TPAK tertinggi di pulau Jawa yakni Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah 73,52 persen, kedua Jawa Timur 70,00 persen, ketiga Jawa Tengah 69,58 persen, keempat Jawa Barat 64,95 persen, kelima Banten 63,79 persen dan keenam DKI Jakarta 62,63 persen. Rata-rata untuk TPAK di pulau Jawa yakni 67,41 persen. Jadi ada tiga provinsi yang angka TPAK nya masih dibawa rata-rata, yakni Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Besarnya pasokan TPAK di Pulau Jawa membuat peningkatan pada produksi barang/jasa yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

(Badan Pusat Statistik, 2021) cara mengukur kemiskinan yakni dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dikatakan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibagi menjadi dua yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM adalah pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan makanan 2.100 kilo kalori/hari

sedangkan GKNM adalah pengeluaran minimal untuk komoditi atau kebutuhan non makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Pulau Jawa memiliki presentase penduduk miskin yang tergolong tinggi yakni 52 persen. Kondisi ini diperparah dengan perilaku merokok yang akan menambah jumlah perokok di Pulau Jawa dengan jumlah rata-rata 28,37 persen. Padahal perilaku merokok sangatlah tidak baik bagi kesehatan. Menurut (Lianzi & Pitaloka, 2014) “perilaku merokok yakni pengetahuan tentang rokok, pengetahuan yang terdiri dari kandungan rokok, bahaya dan dampak merokok”. Sedangkan menurut Levy, dkk (2000) perilaku merokok yakni kegiatan membakar rokok kemudian menghisapnya dan menghembuskannya keluar. Padahal asap rokok tersebut banyak menimbulkan penyakit, seperti penyakit kanker paru-paru, *bronchitis* kronik, jantung, gangguan janin dalam kandungan dan masih banyak lagi. Kebiasaan merokok ini selain membahayakan bagi yang mengonsumsi juga membahayakan bagi orang yang menghirup asap rokok. Menurut Armstrong (1991) rokok adalah produk yang mengandung senyawa nikotin. Nikotin menghasilkan zat adiktif yang menyebabkan orang menjadi ketergantungan dan sulit untuk berhenti atau dapat dikatakan menimbulkan efek ketagihan pada penggunaanya. Walaupun banyak efek negatif yang di timbulkan oleh kebiasaan merokok tetap tidak mengurangi minat seseorang untuk membeli rokok. BPS (2021) perokok di Indonesia pada kelompok usia 25-29 tahun mempunyai presentase sebesar 31,81%. Firdaus (2009)

mengungkapkan upaya pengendalian konsumsi rokok dibutuhkan pemahaman terhadap hubungan antara kemiskinan dan konsumsi rokok di Indonesia.

Selain berdampak negatif bagi kesehatan merokok juga berdampak terhadap ekonomi. Mengonsumsi rokok berarti menggunakan sebagian dari pendapatannya untuk membeli rokok, padahal bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.

TABEL 1.2
JUMLAH PEROKOK DI PULAU JAWA
TAHUN 2021

Provinsi	Perokok (%)
Jawa Barat	32.68
Banten	31.76
Jawa Timur	28.53
Jawa Tengah	28.24
DI Yogyakarta	24.54
DKI Jakarta	24.44

Sumber: BPS tahun 2021

Pada tabel 1.2 terlihat provinsi Jawa Barat memiliki jumlah presentase perokok paling tinggi yakni 32,68 persen. Sedangkan rata-rata perokok di pulau Jawa yakni 28,37 persen. Jadi terdapat tiga provinsi yang presentase nya di bawah rata-rata yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta.

Pulau Jawa jumlah masyarakat yang mengonsumsi rokok cukup mengkhawatirkan karena pendapatan akan banyak dihabiskan untuk

membeli rokok dibandingkan untuk membeli kebutuhan pokok. Munker dan Walter (2001) “menunjukkan kaitan antara lingkungan perumahan dan tingkat konsumsi rokok bahwa kondisi lingkungan dan perumahan yang buruk yang berkaitan dengan tingkat sosio-ekonomi yang rendah ternyata memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat konsumsi rokok. Lingkungan yang stres dan kekurangan secara signifikan lebih rentan terhadap perilaku merokok. Perokok yang tinggal di perumahan sempit di lingkungan yang berisik dan penuh tekanan, lebih sering dilaporkan merokok setiap hari di rumah.”

Selain TPAK dan perilaku perokok ada faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yakni PDRB. BPS menyatakan bahwa PDRB sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan unit ekonomi disuatu daerah. PDRB dapat dikatakan sebagai jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit di daerah atau wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang/jasa yang dihitung setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang/jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Menurut Kesatriani (2020) menyatakan bahwa PDRB pada daerah yang tinggi menandakan daerah tersebut mempunyai perekonomian yang bagus, sedangkan jika PDRB pada daerah tersebut rendah menandakan perekonomiannya tidak bagus. Perekonomian yang dimaksud yakni perekonomian yang meningkatkan kehidupan masyarakat hingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Nilai PDRB yang tinggi akan mengurangi

angka kemiskinan, karena tingginya PDRB akan mengoptimalkan dalam pembangunan suatu wilayah sehingga angka kemiskinan akan menurun. Sumbangan produk domestic regional bruto terbesar yakni sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estat dan jasa Perusahaan, konstruksi. Sektor-sektor tersebut dianggap sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan perekonomian dibandingkan dengan sektor pertanian (Widyawati, 2017). Dengan sektor yang mendukung tersebut akan membuat perekonomian di Indonesia akan membaik dan angka kemiskinanpun menurun.

GRAFIK 1.2
JUMLAH PDRB PER KAPITA DI PULAU JAWA TAHUN 2021



Sumber: Katadata.co.id

Grafik 1.2 menjelaskan PDRB per kapita DKI Jakarta yang tertinggi di Pulau Jawa yakni mencapai Rp 274,7 juta. Kedua yakni Jawa Timur yakni Rp 60 juta, ketiga Banten mencapai Rp 55,2 juta, ke empat Jawa Barat

mencapai Rp 45,3 juta, kelima DI Yogyakarta Rp 40,2 juta, keenam dan yang paling rendah yakni Jawa Tengah yakni Rp 38,7 juta. Sedangkan untuk rata-rata PDRB per kapita atau rata-rata pendapatan per kapita nasional adalah Rp 62,24 juta. Kesimpulannya hanya DKI Jakarta lah yang PDRB nya diatas rata-rata nasional yakni Rp 274,7 juta, sedangkan lima provinsi lainnya masih dibawah rata-rata nasional.

Berdasarkan latar belakang yang ditulis, maka dalam penelitian ini mengambil judul: **“Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Perilaku Merokok Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa”** serta tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang pengaruh dan klasifikasi TPAK, Perilaku Merokok, dan Laju Pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa pada tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah terdapat pengaruh antara TPAK (X1) terhadap Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Perilaku Merokok (X2) terhadap Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Laju Pertumbuhan PDRB (X3) terhadap Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021?

4. Apakah terdapat pengaruh TPAK (X1), Perilaku Merokok (X2), Laju Pertumbuhan PDRB (X3) secara bersama-sama terhadap Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Menganalisis pengaruh TPAK terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021.
2. Menganalisis pengaruh Perilaku Merokok terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021.
3. Menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021.
4. Menganalisis pengaruh TPAK, Perilaku Merokok dan Laju Pertumbuhan PDRB secara bersama-sama terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, yakni:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat sebagai informasi untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Pembangunan yang akan meneliti

mengenai pengaruh TPAK, Perilaku Merokok dan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah literatur bacaan serta hasanah bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang Pengaruh TPAK, Perilaku Merokok dan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa selanjutnya.

1.5 Sistematika Skripsi

Penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang diuraikan secara struktur, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu menjabarkan tentang latar belakang permasalahan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh TPAK, Perilaku Merokok dan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2021. Bab satu ini juga menjabarkan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab dua membahas tentang teori yang akan dijadikan sebagai acuan penelitian dan berisikan tentang pengertian dari seluruh variabel yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara yang ditarik dalam rumusan masalah dan model analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga ini berisikan tentang pendekatan penelitian, mengidentifikasi variabel yang diambil, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik yang dipakai dalam menganalisa masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, model analisis serta pembahasan mengenai permasalahan berdasarkan teori yang ada dan perhitungan statistik dari hasil penelitian yang digunakan serta dengan pembahasannya.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab lima merupakan bab terakhir penelitian yang berisikan simpulan yang ditarik dari analisis, serta pemberian saran yang digunakan sebagai pemecah masalah yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk semua orang.